

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG ANGKUTAN UMUM GRATIS DI KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Angkutan Pelajar)

Akhmad Turahim¹, Agus surya Dharma², Arif Budiman³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: akhmadturahim2424@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi peraturan bupati balangan nomor 91 tahun 2021 tentang angkutan umum gratis di Kabupaten Balangan. Kondisi Angkutan yang kurang nyaman dikarenakan kondisi angkutan umum seringkali mengakibatkan ketidaknyamanan penumpang. Terbatasnya anggaran dapat membatasi penambahan seluruh layanan sekolah. Jumlah armada yang masih kurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis di Kabupaten Balangan. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis di Kabupaten Balangan. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 11 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi penarikan kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Angkutan Umum Gratis memiliki beberapa indikator. Pertama, transmisi informasi kurang optimal karena meski ada media sosialisasi seperti video dan spanduk, beberapa pelajar masih tidak mengetahui kebijakan ini. Kedua, aturan sudah jelas dan mudah dipahami oleh pelajar. Ketiga, kebijakan ini konsisten diterapkan sejak 2021 hingga 2024, namun masih ada masyarakat dan pelajar yang belum mengetahuinya. Keempat, pelaksanaan kebijakan menghadapi tantangan berupa kekurangan staf dan armada. Kelima, meskipun informasi sudah jelas, banyak orang tua pelajar belum mengetahui aturan ini. Keenam, kewenangan dijalankan sesuai peraturan melalui pengendalian transportasi. Ketujuh, fasilitas yang tersedia belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pelajar. Kedelapan, pengangkatan birokrasi dilakukan sesuai peraturan dengan pengendalian transportasi. Kesembilan, tidak ada insentif tambahan karena petugas sudah menerima gaji bulanan. Kesepuluh, petugas melaksanakan tugas sesuai SOP tanpa bertindak semena-mena. Kesebelas, koordinasi antar petugas dan lembaga sudah berjalan optimal.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati, Angkutan Umum Gratis

ABSTRACT

Implementation of Balangan Regent Regulation Number 91 of 2021 concerning Free Public Transportation in Balangan Regency. Transportation conditions are uncomfortable because public transportation conditions often cause passenger discomfort. Limited budget can limit the addition of all school services. The number of fleets is still lacking. The purpose of this study was to determine the Implementation of Balangan Regent Regulation Number 91 of 2021 concerning Free Public Transportation in Balangan Regency. And to find out the factors that influence the Implementation of Balangan Regent Regulation Number 91 of 2021 concerning Free Public Transportation in Balangan Regency. This researcher uses a qualitative approach. The writing method uses a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data source uses a purposive sampling technique with a total of 11 people. After the data is collected, it is then analyzed using techniques including data reduction, data presentation, and verification of conclusion drawing. The study shows that the implementation of Balangan Regent Regulation Number 91 of 2021 concerning Free Public Transportation has several indicators. First, the transmission of information is less than optimal because even though there are socialization media such as videos and banners, some students are still unaware of this policy. Second, the rules are clear and easy for students to understand. Third, this policy has been consistently implemented from 2021 to 2024, but there are still people and students who do not know about it. Fourth, the implementation of the policy faces challenges in the form of a shortage of staff and fleet. Fifth, even though the information is clear, many parents of students do not know about this rule. Sixth, authority is

exercised according to regulations through transportation control. Seventh, the available facilities are inadequate to meet the needs of students. Eighth, the appointment of bureaucracy is carried out according to regulations with transportation control. Ninth, there are no additional incentives because officers already receive monthly salaries. Tenth, officers carry out their duties according to SOP without acting arbitrarily. Eleventh, coordination between officers and institutions has been running optimally.

Keywords: *Implementation, Regent Regulation, Free Public Transportation*

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Balangan telah meluncurkan program angkutan umum gratis untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Dinas Perhubungan (Dishub) menyediakan armada angkutan yang bertujuan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, seperti perjalanan ke pasar dan kantor pemerintahan. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi kemacetan di jalan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun terdapat kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan armada dan anggaran, upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan transportasi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat maupun pelajar.

Pemerintah Kabupaten Balangan telah meluncurkan program angkutan umum gratis untuk pelajar, bertujuan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan (Dishub) menyediakan 11 unit angkutan yang beroperasi sesuai dengan jam sekolah, memastikan keamanan dan kenyamanan siswa. Program ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan mempermudah mobilitas masyarakat.

Angkutan Umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang dan orang dari suatu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh perorangan, perusahaan swasta atau pemerintah, dan dapat digunakan oleh siapa saja untuk pembayaran atau persewaan. Terminologi angkutan umum digunakan tidak hanya untuk angkutan orang, tetapi juga untuk angkutan barang. Adapun dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Dengan adanya sarana Angkutan umum, penumpang dapat langsung menikmati kenyamanan sekaligus dapat mengangkut barang bawaannya ke tempat tujuan tertentu, dan kartu pembayaran pengguna Angkutan umum tertulis di fasilitas perjanjian Angkutan pengguna jasa atau biasa disebut tiket pembayaran.”

Namun demikian, kondisi angkutan umum berbasis jalan khususnya angkutan bus di Indonesia masih belum sempurna. Kinerja angkutan umum belum memadai, dan kualitas layanan keamanan tidak menjadi prioritas. Prioritas utama selama ini adalah angkutan umum yang murah

dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dan Pelajar yang terkadang hal tersebut digunakan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Padahal pelayanan publik harus diutamakan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi polusi udara dan merintis Kembali penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Balangan, maka pemerintah mempercepat untuk merancang kebijakan, seperti Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis.

Perhubungan Kabupaten Balangan memegang peranan kunci dalam mengimplementasikan kebijakan angkutan umum gratis. Tugas utama Dinas Perhubungan adalah memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan efektif, menyediakan layanan yang memadai, serta menangani berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses implementasi. Namun, pelaksanaan kebijakan ini tidak sepenuhnya berjalan mulus, dan beberapa tantangan serta hambatan signifikan perlu diperhatikan.

Demikian berdasarkan observasi peneliti, pelaksanaan kebijakan tersebut masih terkendala beberapa hal khususnya untuk Pelajar Seperti:

1. Kondisi Angkutan yang kurang nyaman. Dikarenakan Kondisi angkutan umum seringkali mengakibatkan ketidaknyamanan penumpang. Seperti, kursi yang bergoyang dan sulitnya mendapatkan suku cadang asli dapat mengurangi minat Pelajar untuk menggunakan layanan angkutan pelajar.
2. Terbatasnya anggaran dapat membatasi penambahan seluruh layanan sekolah
3. Jumlah armada yang masih kurang. Yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pelajar yang dibutuhkan layanan, pelajar yang dijemput sekitar 216 pelajar dengan jumlah 6 armada avp, 2 bus dan 3 Elf angkutan pelajar, Sedangkan jumlah pelajar yang ada berjumlah 517 pelajar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG ANGKUTAN UMUM GRATIS DI KABUPATEN BALANGAN (STUDI ANGKUTAN PELAJAR)**”

METODE

Dalam peneliti ini penulis menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* yang informan sebanyak 11 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis melalui cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat indikator yang berfokus pada teori implementasi menurut George C. Edward III (dlm Leo Agustino 2016:137) adapun hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai berikut i:

1. Komunikasi

a. Transmisi

Dapat disimpulkan bahwa transmisi masih belum cukup baik. karena belum optimalnya Penyaluran Sosialisasi yang dilakukan. Karena spanduk yang di pasang hanya pada Dinas Perhubungan saja, seharusnya dipasang pada jalan yang dilalui trayek tersebut supaya pelajar bisa melihatnya tidak harus ke Dinas Perhubungan.

b. Kejelasan

Dapat simpulkan bahwa kejelasan yang terdapat dalam setiap peraturan yang dimaksud sudah jelas serta mudah dipahami bagi setiap pelajar.

c. Konsistensi

Dapat simpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2021 tentang angkutan umum gratis konsisten dilaksanakan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 ini. Akan tetapi masih ada masyarakat dan pelajar belum mengetahui perihal tersebut.

2. Sumber Daya

a. Staf

Dapat di esimpulan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan menghadapi tantangan kekurangan staf dan armada dalam mendukung pelaksanaan kebijakan angkutan umum gratis.

b. Informasi

Dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi yang terdapat dalam setiap pasal pada peraturan yang dimaksud sudah jelas formasinya kepada pelajar.

c. Wewenang

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan di jalankan sesuai yang ada di dalam peraturan kebijakan tersebut. Melakukan pengendalian transportasi: Dishub berperan dalam mengontrol arus kendaraan dan menentukan rute.

d. Fasilitas

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang tersedia pada dinas Perhubungan belum memadai untuk Angkutan/Armada, tidak mencukupi kebutuhan pelajar.

3. Disposisi

a. Pengangkatan Birokrasi

Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan birokrasi di jalankan sesuai yang ada di dalam peraturan kebijakan tersebut. Melakukan pengendalian transportasi: Dishub berperan dalam mengontrol arus kendaraan, menentukan rute, dan menyediakan infrastruktur transportasi yang dibutuhkan.

b. Intensif

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemberian intensif atau gaji tambahan yang diberikan karena sudah adanya gaji bulanan yang diberikan, dan untuk anggarannya saja masih kurang. dengan tidak ada pemberian insentif menyebabkan mereka menjadi tidak semangat beroperasi atau menjalankan tugasnya sehingga juga berpengaruh terhadap berjalannya perbup tersebut.

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operating Prosedur

Dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya di lapangan para petugas sudah menjalankan tugasnya dengan optimal sesuai dengan standar operation prosedur yang diterbitkan dan tidak berbuat semena-mena.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis Di Kabupaten Balangan (Studi Angkutan Pelajar)” terdiri dari :

1. Faktor Pendukung

a. Keberlanjutan Informasi kepada Masyarakat dan Pelajar

Hal ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pelajar bahwa program tersebut benar-benar gratis. Keberlanjutan program ini juga akan dikaji lebih lanjut berdasarkan tingkat minat masyarakat dan pelajar dalam menggunakan angkutan umum, yang secara tidak langsung dapat membantu menggerakkan perekonomian daerah. Meski sebagian besar masyarakat sudah mengetahui program ini, masih ada beberapa yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan keberlanjutannya, sehingga upaya komunikasi yang terus-menerus tetap diperlukan.

b. Kebijakan yang Berbasis Hukum dan Ketentuan Operasional

Kebijakan yang diambil telah dirancang secara inklusif tanpa membedakan kelas masyarakat dan pelajar, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap standar operasional prosedur yang ditetapkan. Hal ini mendukung transparansi informasi kepada masyarakat dan pelajar terkait layanan yang tersedia. keterbatasan armada dan anggaran masih menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas penyebaran informasi yang menyoroti pentingnya proses birokrasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti Bupati dan instansi terkait, yang memastikan kebijakan diinformasikan dan diterapkan secara menyeluruh dalam pelaksanaan kewenangan yang sesuai dengan ketentuan, termasuk perekrutan personel oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), turut mendukung implementasi kebijakan secara efektif, sehingga keberlanjutan informasi kepada masyarakat pelajar dapat terjaga dengan baik.

2. Faktor Penghambat

- a. Kondisi Angkutan yang kurang nyaman armada Terhadap Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis.

Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Angkutan Umum Gratis (Studi angkutan pelajar) adalah ketidaknyamanan penumpang, termasuk kesulitan duduk dan kondisi panas di dalam armada.

- b. Terbatasnya armada Terhadap Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis

dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis (Studi angkutan pelajar) adalah kurangnya anggaran untuk menambah armada, sehingga ada beberapa titik di wilayah kabupaten Balangan yang belum terjangkau angkutan umum gratis.

- c. Jumlah armada yang masih kurang Terhadap Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis.

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat adalah jumlah armada yang terbatas terhadap kebijakan sehingga tidak banyak sasaran yang terlayani untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelajar di kabupaten balangan. Observasi peneliti menunjukkan dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis (Studi angkutan pelajar) adalah kurangnya armada sehingga ada beberapa titik di wilayah kabupaten Balangan yang belum terjangkau angkutan umum gratis.

SIMPULAN

Hasil Dari hasil pelaksanaan kegiatan penelitian berdasarkan data dan informasi yang dipeoleh selama melakukan penelitian Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis (Studi Angkutan Pelajar)

1. Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis belum optimal dilihat dari indikator : Pertama Transmisi peraturan sudah optimal karena ada beberapa Masyarakat dan pelajar yang belum tahu, juga ada Masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi karena di anggap lebih simple atau lebih mudah, Kedua kejelasan informasi yang terdapat dalam setiap pasal pada peraturan yang dimaksud sudah jelas serta mudah dipahami bagi setiap warga masyarakat, Ketiga keadaan fasilitas yang tersedia pada dinas Perhubungan belum lengkap dan tidak memadai untuk Angkutan /Armada, Keempat pengangkatan birokrasi sudah diterapkan sesuai aturan dan dilaksanakan dengan baik dan cukup Optimal, Kelima indikator insentif tidak ada pemberian intensif atau gaji tambahan yang diberikan karena sudah adanya gaji bulanan yang diberikan, menyebabkan mereka kurang bersemangat menjalankan tugasnya, tentu sangat berpengaruh terhadap berjalannya kebijakan tersebut, di karenakan minimnya anggaran. Keenam indikator SOP dalam melaksanakan tugasnya di lapangan para petugas sudah menjalankan tugasnya dengan optimal sesuai dengan standar operation prosedur yang diterbitkan. dan tidak berbuat semena-mena terhadap para pelanggar aturan, dan Ketujuh indikator fregmentasi koordinasi yang dilakukan antara petugas atau pelaksana kebijakan sudah dilaksanakan dengan optimal, baik koordinasi antar sesama lembaga yaitu dengan lembaga lainnya.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis. Faktor penghambat yaitu : Kurangnya Armada Angkutan Terhadap Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis tidak optimal dikarenakan minimnya anggaran yang disediakan sehingga hal tersebut



cukup menghambat tercapainya program kebijakan tersebut, dan kurangnya anggaran terhadap Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis. Dan faktor pendukung yaitu : Keberlanjutan Informasi kepada Masyarakat dan Pelajar, Kebijakan yang berbasis hukum dan ketentuan operasional, Dan faktor pendukung terakhir yaitu Penerapan Kebijakan Sesuai Standar Operasional Prosedur (Sop).



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- Anonim. *Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Angkutan Umum Gratis*
- Abdul, Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Affrian, Reno, 2023, *Model Model Formulasi Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan*. CV BINTANG SEMESTA
- Agustino, Leo, 2016 *Dasar Dasar kebijakan Publik, Bandung, ALFABETA, CV*
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan. Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung : CV Pustaka
- Berg, B.L., dan Lune, H. 2012. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences 8th Ed, United States : Pearson Education Inc.*
- Budi Gonturu, 2020, *budaya dan desain komunikasi kebijakan publik, jakarta PT REMAJA POSDAKARYA*
- Budi, Winarno. 2002. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media. Presindo
- Damayanti,irma. 2022. *Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Di Kota Makassar (Studi Penerapan Teman Bus Trans Mamminasata)*: tidak diterbitkan
- Dewi, Rahayu Kusuma, 2016, *Studi analisis kebijakan, CV PUSTAKA SETIA*
- Erma Kodriyai. 2016. *implementasi kebijakan angkot gratis bagi pelajar dan mahasiswa di kota kediri*: tidak diterbitkan
- Mulyadi, Deddy 2016, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik, ALFABETA, CV*
- Subarsono, A.G. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono. 2014. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2016. *Metode kuantitatif, kualitatif dan R&B*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Bandung: Alfabeta,.
- Winarno, Budi, 2014, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, yogyakarta PT BUKU SERU*
- Haryoko, Spto, 2020, *Analisis Data Penelitian Kualitatif(Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*, makassar: Universitas Negeri Makassar